

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pembangunan sektor pertanian merupakan prioritas utama di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis pembangunan nasional. Selain itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah di sektor pertanian (Panudju, dkk, 2013:6).

Krisis pangan merupakan isu strategis dunia saat ini, ketidak seimbangan antara peningkatan populasi penduduk dengan ketersediaan lahan pemukiman memunculkan masalah yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan, sedangkan kebutuhan pangan meningkat tajam. Akibatnya lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non pertanian. Hal ini diiringi dengan masalah perubahan iklim yang berdampak terhadap menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas hasil panen (Panudju, dkk, 2013:6).

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial dan membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial (Bulog, 2014:1).

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi pedesaan, sebagai *wage good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin (Bulog, 2014:1).

Pertimbangan tersebut menjadi alasan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan

produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan goegrafi yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar (Bulog,2014:1).

Dilihat dari hirarkinya ketahanan pangan mencakup ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan regional/lokal dan ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Penyediaan pangan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari impor. Sebagai suatu Negara kepulauan dengan penduduk besar maka penyediaan pangan harus semaksimal mungkin berasal dari produksi dalam negeri (swasembada) dan tidak bergantung kepada pangan impor (Saragih, 2010:249).

Ketahanan pangan sangat terkait dengan aspek kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, namun yang utama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan (Saragih, 2010:249).

Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, tentu akan menyebabkan penurunan produksi pertanian termasuk menurunnya produksi beras. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui buku cetak sawah baru 2013 menyatakan ekstensifikasi pertanian perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, pemerintah melalui RPJPMN tahap-2 (2010-2014) menyebutkan bahwa salah satu target sukses pembangunan pertanian adalah mencapai swasembada berkelanjutan padi, jagung dan kedelai.

Dalam upaya ekstensifikasi lahan pemerintah pada tahun 2006-2010 telah membentuk Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air (PLA) yang salah satu tugas dan fungsinya untuk mengelola perluasan areal tanam beberapa komoditi termasuk padi. Dengan fokus kegiatan pada daerah luar Jawa. Dengan hasil cetakan sebanyak 69.102 ha, untuk jangka waktu 5 tahun, luasan tersebut memang belum mengesankan. Fase tersebut dilanjutkan pada periode kedua pada tahun 2010. Pada

fase ini kegiatan perluasan sawah ditangani oleh eselon satu baru yang bernama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Buku Cetak Sawah baru 2013, di sebutkan bahwa tujuan dari program perluasan sawah baru yakni untuk perluasan areal tanam dan menambah baku lahan pertanian yang menjadi salah satu tuntutan dari pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman guna mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dan swasembada beras.

Program pencetakan sawah baru merupakan program yang membantu kelompok tani yang berniat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan sawah. Dalam hal ini, pemerintah membantu pendanaan pelaksanaan pembukaan lahan sawah dengan proses dan ketentuan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan program ini dibantu oleh TNI AD dalam upaya penguatan lembaga dan percepatan penyelesaian fisik dan dilapangan. Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana di bidang pertanian (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014).

Program pencetakan sawah baru diharapkan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya program tersebut. Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, optimalisasi jam kerja, pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu peningkatan produksi beras merupakan salah satu tujuan pelaksanaan program pencetakan sawah baru ini, melalui program ini di harapkan dapat dicapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Upaya pemerintah dalam pelaksanaan perluasan lahan sawah melalui program pencetakan sawah baru dibayangi dampak negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan ekosistem dan habitat alami pada lahan-lahan tertentu. Selain itu, penambahan luas baku lahan sawah tentu akan meningkatkan jumlah biaya produksi dan jam kerja petani jika dibandingkan dengan kondisi awal petani sebelum mendapatkan program. Dengan demikian tentu penambahan biaya produksi dan jam kerja akan mempengaruhi keuntungan petani baik itu terjadi peningkatan keuntungan atau justru mengalami kerugian jika di bandingkan dengan kondisi awal petani sebelum mendapatkan program. Apabila mengalami kerugian, hal tersebut tentu mempengaruhi keberlanjutan program pencetakan sawah baru.

Penelitian ini difokuskan kepada dampak ekonomi yang diberikan program pencetakan sawah baru. Hal itu dilakukan dengan melihat, luas lahan yang dimanfaatkan, penyerapan tenaga kerja, optimalisasi jam kerja, dan keuntungan usahatani.

B. Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan program swasembada pangan dan ketahanan pangan tentu perlu diadakan perluasan lahan. Mengingat intensifikasi saja tidak cukup memberikan solusi, maka perlu di adakan perluasan lahan untuk tanaman pangan. Program pencetakan sawah baru datang untuk mendukung mewujudkan program ketahanan pangan. Melalui bantuan dalam bentuk dana untuk pembukaan sawah baru di daerah/lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran program pencetakan sawah baru, hal ini mengingat masih banyaknya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi sawah baru. Menurut Balai Penelitian Tanah dalam Edi Mawardi (2002), luas budidaya pertanian lebih sempit di bandingkan lahan non pertanian. Luas lahan pertanian untuk perkebunan, sawah, tegalan, dan kebun campuran diperkirakan sekitar 1.213.005 ha atau 34,1% dari luas daerah ini. Sementara, lahan non pertanian yang terdiri dari hutan, semak/belukar, waduk/danau diperkirakan seluas 2.376.975 ha atau 65,9% dari luas daerah ini. Lahan pangan ini di dominasi oleh padi sawah seluas 483.144 ha. Selanjutnya, pewayalahan untuk tanaman pangan dan sayuran (padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu, dan cabai) diperkirakan 22.142 ha.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, di Sumatera Barat ada beberapa kabupaten yang melaksanakan program pencetakan sawah baru (lampiran 1). Dari data tersebut total luas lahan yang menjadi target program pencetakan sawah baru adalah seluas 1.058 ha.

Daerah Agam telah melaksanakan pencetakan sawah baru di dua kecamatan yakni Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara dengan total luas lahan sawah hasil pencetakan sawah baru seluas 59 ha. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, di daerah Tanjung Mutiara program pencetakan sawah baru di laksanakan di Nagari Tiku pada kelompok tani Mutiara Antokan dengan luas lahan sawah hasil pencetakan sawah baru seluas 40 ha. Sementara di

daerah Lubuk Basung program pencetakan sawah baru dilakukan di Nagari Lubuk Basung Jorong I Siguhung pada kelompok tani Bina Usaha dengan luas lahan sawah hasil pencetakan seluas 19 Ha (Lampiran 2).

Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam merupakan daerah yang sawah barunya telah memasuki musim tanam kedua setelah pada bulan Agustus tahun 2016 melakukan tanam perdana dan panen perdana pada awal November tahun 2016. Tanam kedua dilaksanakan pada pertengahan November tahun 2016 dan panen kedua direncanakan pada bulan Februari tahun 2017. Berdasarkan prasurey yang dilaksanakan hasil panen perdana masih belum maksimal, hal ini dikarenakan sawah baru hasil program pencetakan masih dalam tahap pemantapan dari keseluruhan fasilitas seperti irigasi dan jalan serta penyesuaian PH tanah pada sawah baru hasil program pencetakan sawah baru.

Berhasil atau tidaknya program pencetakan sawah baru akan memberikan dampak yang cukup berarti bagi perkembangan pertanian sawah daerah Lubuk Basung terutama terkait berhasil atau tidaknya program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas beras serta peningkatan taraf hidup di daerah tersebut sesuai dengan tujuan program pencetakan sawah baru.

Program pembangunan ekonomi yang umumnya berlandaskan pada program pembangunan pertanian tentu memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat yang menjadi target program pembangunan tersebut. Dalam hal ini salah satunya adalah program pencetakan sawah baru, yang memiliki tujuan menambah luas baku lahan sawah. Penambahan luas baku lahan diadakan pada lahan yang tidak termanfaatkan sebelumnya. Hal tersebut tentu secara tidak langsung menyisipkan tujuan pengentasan kemiskinan, melalui penyerapan tenaga kerja yang kemudian memberikan pekerjaan baru bagi masyarakat. Serta peningkatan pendapatan petani melalui hasil produksi dalam usahatani yang dilakukan di sawah baru hasil program pencetakan sawah baru.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui dampak ekonomi dari program pencetakan sawah baru di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk terhadap petani penerima program dengan munculnya pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan usahatani pada sawah baru hasil program pencetakan sawah baru di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?
2. Bagaimana dampak ekonomi dari program pencetakan sawah baru di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?

Dari uraian di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Ekonomi Program Pencetakan Sawah Baru di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam**”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan profil usaha tani pada sawah baru hasil program pencetakan sawah baru.
2. Melakukan analisis dampak ekonomi dari program pencetakan sawah baru di Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan program pencetakan sawah baru yang lebih baik sehingga diharapkan mampu membantu instansi atau individu yang membutuhkan informasi mengenai dampak ekonomi program pencetakan sawah baru
2. Bagi peneliti sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian (SP)